

## Sikap Indonesia Terhadap Krisis China Dan Amerika Serikat Di Laut China Selatan

### *Indonesia's Attitude Towards The Crisis Between China and The United States in The South China Sea*

Yulia Rimapradesi<sup>\*1</sup>, Siti Nurahmi Nasution<sup>2</sup>, S. Thoriq Musthofa Ahmad<sup>3</sup>, Fadel Muhammad<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Humaniora, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, 63471, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Kota Medan, 20155, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Humaniora, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, 63471, Indonesia

<sup>4</sup> Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta, 12520, Indonesia

\*Corresponding Author: [yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id](mailto:yuliarimapradesi@unida.gontor.ac.id)

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received 24 Maret 2023

Revised 28 April 2023

Accepted 29 April 2023

Available online 30 April 2023

E-ISSN: 2964-4011

##### How to cite:

Rimapradesi, Yulia (2023). Sikap Indonesia Terhadap Krisis China Dan Amerika Di Laut China Selatan. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 2(1), 42-46.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.  
(10.32734/nlr.v2i1.11610)

#### ABSTRACT

Although not being a claimant state, The stability of the South China Sea region will have an impact on the stability of Indonesia., which will have an effect on Indonesia's economic growth. This research discusses Indonesia's attitude towards the China and America crises in the South China Sea. This paper will clarify using qualitative research in the form of a literature study. A crisis developed in the area as a result of tensions between China and the United States in the South China Sea. The study's findings demonstrate Indonesia's objectivity toward the regional conflict between the United States and China. As a country that originated the Non-Aligned Movement (NAM), Indonesia tried to be impartial and involved in maintaining international peace as much as possible.

**Keyword:** Crises, South China Sea, Indonesia

#### ABSTRAK

Meski tidak menjadi *claimant state*, stabilitas kawasan Laut China Selatan akan berdampak pada stabilitas Indonesia, yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini membahas tentang sikap Indonesia terhadap krisis China dan Amerika di Laut China Selatan. Tulisan ini akan memperjelas dengan menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi literatur. Krisis yang berkembang di wilayah tersebut sebagai akibat dari ketegangan antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan. Temuan studi tersebut menunjukkan objektivitas Indonesia terhadap konflik regional antara Amerika Serikat dan China. Sebagai negara pencetus Gerakan Non Blok (GNB), Indonesia berusaha untuk tidak memihak dan sedapat mungkin terlibat dalam menjaga perdamaian internasional.

**Keyword:** Krisis, Laut China Selatan, Indonesia

## 1. Pendahuluan

Bagi perekonomian, Laut Cina Selatan (LCS) merupakan koridor laut yang sangat penting, terutama untuk perdagangan dan pelayaran internasional. Wilayah laut ini tidak hanya merupakan jalur laut tersibuk kedua di dunia, tetapi juga menawarkan banyak makhluk hidup serta cadangan minyak serta gas alam yang begitu signifikan. LCS atau Laut China Selatan masih menjadi wilayah yang diperdebatkan karena klaim yang dibuat oleh berbagai negara Asia Tenggara yang memiliki zona laut terdekat karena potensinya. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang turut berperan aktif dan ikut bagian dalam eskalasi ketegangan di kawasan Laut China Selatan. China dan Amerika Serikat saat ini diakui sebagai dua negara terbesar. Bangsa-bangsa yang terhegemoni berlomba-lomba untuk menguasai kawasan Laut China Selatan secara ekonomi. Beberapa analis bahkan berspekulasi tentang prospek konflik atau perang di abad ke-21 sebagai akibat persaingan (Saragih, 2018).

Isu LCS pertama dimulai pada 1970-an dan belum diselesaikan. Ada beberapa negara yang menjadi claimant state dalam konflik LCS, antara lain China, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam dan Taiwan, semuanya menegaskan klaim parsial atas kedaulatan nasional. China mendasarkan klaimnya pada sejarah, sedangkan negara penggugat lainnya mengandalkan kriteria geografis yang digariskan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Negara-negara Asia Tenggara secara geografis dan politik berpusat di sekitar Laut Cina Selatan. Sebagai garis pantai energi dan sumber manufaktur, kawasan ini sangat penting bagi stabilitas negara-negara tetangga. Yang mana di kawasan ini terdapat sekitar 900 T kaki kubik gas alam dan 7 M barel minyak. Pasokan energi jangka panjang dan perdagangan produk lintas batas di Asia Timur, Asia Tenggara, dan kawasan Asia Pasifik diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Laut Cina Selatan. Juga, ia menawarkan sumber prospektif untuk produksi dan distribusi. Dengan nilai sekitar \$5 triliun per tahun, Laut Cina Selatan, salah satu jalur penyeberangan maritim, membantu meningkatkan nilai perdagangan internasional. konteks geografis, yaitu Laut Cina Selatan, yang kaya akan sumber daya produktif, dapat berfungsi sebagai medan perang untuk konflik geopolitik dan ekonomi yang penting (persaingan strategis). Dan tidak hanya untuk negara-negara besar seperti Cina, Jepang, dan Amerika Serikat, tetapi juga untuk negara-negara kecil terdekat dengan klaim teritorial seperti Taiwan dan sejumlah anggota ASEAN. Penyebab konflik di kawasan Laut Cina Selatan bisa dibagi menjadi dua kategori berdasarkan keadaan tersebut. Kontrol atas akses ke sumber manufaktur adalah kekuatan pendorong pertama di belakang persaingan. Kedua, sengketa wilayah yang menyangkut 'political interest' dan 'security of states' yang memiliki ikatan kepada Asia Tenggara. Akibat tuding tumpang tindih, dinamika sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) terus menjadi persoalan. Keamanan utama kawasan ASEAN. Laut Cina Selatan adalah perairan geografis yang berbatasan dengan sepuluh negara: Filipina, Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Taiwan. Yang terletak di antara Taiwan di utara dan pantai selatan Cina, dan di antara negara-negara Asia Tenggara di barat (Sulistiyani, 2021).

Laut Cina Selatan, juga dikenal sebagai LCS, adalah rute tersibuk di dunia dan terdiri dari Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Lines of Trade (SLOT) yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia. Separuh dari aktivitas perdagangan global yang tercatat melewati wilayah tersebut. Selain itu, LCS memiliki simpanan sumber daya alam dengan nilai ekonomi yang signifikan, termasuk minyak dan gas. Karena nilai strategisnya, setiap negara penuntut berusaha melindungi kepentingannya sendiri dengan mengambil tindakan dan manuver yang berbeda. Karena rumitnya isu LCS, kekuatan besar seperti Amerika Serikat justru ikut terlibat dalam krisis di kawasan. Sementara China memiliki peta sembilan garis putus-putus, Amerika hadir dengan meningkatkan frekuensi kegiatan Freedom of Navigation Operation (FONOPS) untuk melawan ekspansi China pada kawasan itu. (Sulistiyani, 2021) Ketika China menegaskan kedaulatan atas Provinsi Kepulauan Riau, yang di dalamnya terdapat Kepulauan Natuna dan merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, kontroversi LCS juga telah "menyeret" Indonesia. Sementara itu, China mengklaim memiliki klaim hukum atas perairan di sekitar Kepulauan Natuna berdasarkan teori zona penangkapan ikan tradisional. Klaim sepihak China atas perairan Natuna berlanjut sejak 2013, menempatkan Indonesia dan China dalam skenario "tegang" yang memuncak pada 2016. Dengan menggunakan 'pemaksaan', China meningkatkan kekuatan klaimnya di pulau-pulau yang diperebutkan. Ini mengurangi sensitivitas untuk menolak dan kebutuhan untuk unjuk kekuatan. Selanjutnya, menunjukkan bahwa perselisihan tersebut mengungkapkan pola perilaku Tionghoa yang dapat digambarkan sebagai "memanfaatkan peluang" (Yee, 2011). Tampaknya China sangat mahir memanfaatkan momen yang tepat untuk bergerak saat merasakannya lawan terganggu atau ketika tidak ada respons kuat yang diharapkan. Sebagai contoh, bentrokan angkatan laut tahun 1974 dilakukan dengan menguntungkan latar belakang politik pemulihan hubungan AS-China, yang berarti ada praktis tidak ada kemungkinan intervensi Amerika. Dengan latar belakang ini, China mendahului pendudukan Uni Soviet atas pulau-pulau tersebut setelah Perang Vietnam.

Keikutsertaan Amerika dalam konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan dimulai Pada musim panas 2015, Filipina mengajukan petisi ke Permanent Court of Arbitration di Den Haag untuk menentang klaim Tiongkok yang dibuat sesuai dengan UNCLOS atas rantai pulau (termasuk garis berbentuk U). Pada bulan Oktober 2015, PBB menetapkan bahwa mereka memenuhi syarat untuk memberikan keputusan atas masalah tersebut (Rolf & Agnew, 2016). Temuan yang paling krusial adalah bahwa batas berbentuk U China melanggar UNCLOS dan karena itu melanggar hukum internasional, merongrong penegasan kedaulatan maritim China. Secara lebih umum, terlepas dari protes pemerintah RRT, hasilnya menjamin kemampuan hukum Amerika Serikat untuk melakukan patroli laut tanpa khawatir akan mengganggu kedaulatan Tiongkok. Pengadilan tidak memiliki mekanisme penegakan hukum, dan Tiongkok selalu menolak untuk mengikuti putusan apa pun, seolah-olah membuat penyelesaian De facto adalah hasil yang paling mungkin. China telah lama menyesali bagaimana konflik LCS menjadi lebih rumit dan kecil kemungkinannya untuk diselesaikan secara damai karena keikutsertaan 'non claimant state'. Terutama AS, yang terlibat dalam krisis yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan. Mayoritas pembuat kebijakan China bersikukuh bahwa AS dan negara non-klaim lainnya, termasuk India dan Jepang, tidak memiliki wewenang untuk terlibat dalam konflik LCS. China secara rutin mengungkapkan penentangannya terhadap anggapan campur tangan AS dalam pernyataan publiknya yang diarahkan ke Washington (Chan & Li, 2015).

Kapal penangkap ikan China terpantau memasuki ZEE Indonesia pada Maret, Mei, dan Juni 2016 serta terlibat dalam sejumlah Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, juga tidak diatur (IUU fishing). Peristiwa berulang pada 2019 dan 2020, kali ini melibatkan pelanggaran serupa oleh kapal penangkap ikan dan penjaga pantai China. Pemerintah Indonesia, di sisi lain, tidak mengakui sembilan garis putus-putus dan menilai China telah melanggar zona

ekonomi eksklusifnya, khususnya di Laut Natuna Utara (Rosana, 2020). Berbagai aktifitas pelanggaran di atas terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara Tiongkok dan Indonesia. Menurut pemerintah China, penjaga pantai memiliki hak untuk mengawasi area sembilan garis putus-putus, dan kapal penangkap ikannya memiliki hak untuk mengarungi lautan. Pemerintah Indonesia, di sisi lain, tidak menerima sembilan garis putus-putus dan menilai China telah melanggar ZEE Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara. Dari berbagai hal yang dijelaskan di atas, tentu terlihat jelas bahwa sebenarnya krisis yang terjadi di laut Cina selatan ini sendiri bukan hanya hal yang bersinggungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat saja, namun Indonesia mendapat peran didalamnya. Penulisan ini akan melihat bagaimana sebetulnya sisi Indonesia Dalam menghadapi krisis yang terjadi di laut Cina Selatan diantara tidak baiknya hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat.

## 2. Metode

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dengan menggunakan buku, artikel, dan jurnal sebagai sumber penelitian yang dikutip sesuai dengan tema penelitian. Sedangkan pada pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikannya dengan benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan serta diperoleh dari situasi yang ilmiah, Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang mana buku serta artikel jurnal menjadi sumber penelitian dimana semuanya sesuai dengan topik penelitian (Moleong, 2017).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kepentingan Indonesia pada Laut China Selatan

Berbagai kebijakan sengketa LCS negara penggugat terkait erat dengan upaya mereka untuk memajukan kepentingan nasional mereka sendiri. Dalam membahas kepentingan nasional Indonesia, penting untuk mempertimbangkan dua faktor yang saling terkait, yaitu dinamika konflik LCS dan kontak di seluruh Laut Natuna Utara. Padahal China mengklaim telah mengontak kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara melalui sembilan garis putus-putus nine dash line, padahal Indonesia bukan salah satu negara claimant. Mengaju kepada gagasan 'national interest', yang didalamnya terdapat kepentingan ekonomi, militer, dan internasional Indonesia di Laut Natuna Utara. Karena ambisi teritorialnya, Indonesia memiliki kepentingan dan kebutuhan pertahanan. Akibatnya, terdapat keterkaitan antara kepentingan komersial dan otoritas berdaulat, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di ZEE. Karena jalur perdagangan dan maritimnya yang mendunia, adalah kepentingan seluruh planet untuk mengawasi stabilitas dan keamanan kawasan tersebut. Demi mempertahankan wilayahnya di luar Laut Natuna Utara, kepentingan pertahanan Indonesia menjadi ujian. Sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982, Indonesia menegaskan bahwa perairan teritorialnya merupakan komponen dari wilayah kedaulatannya (UNCLOS). Indonesia memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi kekayaan alamnya secara mandiri. Jadi, ada keterkaitan antara ini dengan kepentingan ekonomi Indonesia. Laut Natuna merupakan rumah bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016. Apalagi, wilayah tersebut berpeluang memiliki sumber daya alam tambahan. Yang mana kawasan Natuna mengandung gas alam dan minyak. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Blok East Natuna dapat menampung hingga 36 juta barel minyak dan gas alam dalam jumlah yang sama (Initial Gas in Place/IGIP). Ada juga 46 triliun kaki kubik (tcf) cadangan gas alam, dengan total 222 tcf. Mengingat potensi klaim tersebut, Indonesia memiliki hak hukum untuk menguasai sumber daya di Laut Natuna Utara guna memajukan pembangunan ekonomi dan kemakmuran di sana.

### 3.2 Konflik Laut China Selatan

Dapat dikatakan bahwa sejarah sengketa Laut China Selatan (LCS) telah berlangsung sangat lama dalam berbagai keadaan dan situasi, serta dengan kekuatan politik global yang beragam (Maksum, 2017). Secara historis, negara-bangsa di kawasan Asia Tenggara belum ada saat perang Laut China Selatan (LCS) pertama kali dimulai. Sebelum monarki lokal pada saat itu tampaknya memiliki strategi dan memahami potensi kekayaan LCS yang sangat besar. Akibatnya, tampaknya organisasi-organisasi ini semakin memperluas pengaruh politik mereka di wilayah Laut Cina Selatan yang sudah dipadati oleh kapal-kapal niaga. Dinasti Han, khususnya jalur perdagangan maritim untuk barang dan jasa, merupakan salah satu poros perdagangan yang menyadari potensi ini. Di tengah merebaknya penyakit Virus Corona atau pandemi Covid-19 yang melanda dunia, ketegangan situasi di LCS benar-benar meningkat. Sementara negara-negara Asia Tenggara masih fokus menangani wabah Covid-19 di negaranya sendiri, China menunjukkan sikap yang lebih agresif di kawasan Laut China Selatan karena memulai proses pemulihan dari penyebaran virus yang bermula di negaranya sendiri. Presiden Xi Jinping memberi lampu hijau kepada militer China untuk mempersiapkan perang pada 26 Mei 2020. Sementara itu, Amerika gencar memperluas operasi militernya di wilayah atau wilayah Laut China Selatan untuk menjamin kebebasan navigasi. Pada pertengahan Mei 2020, militer AS telah menerbangkan pembom B-1B Lancer sebanyak 39 kali di atas LCS dan melakukan banyak operasi navigasi dengan kapal perang Amerika, termasuk pesawat USS Roosevelt (Bangun., 2021). Ketakutan akan perang militer terbuka di LCS meningkat akibat keadaan ini, dan ini akan berdampak pada keadaan keamanan kawasan. Lingkungan keamanan yang kondusif

penting bagi ASEAN, Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN tidak menyukai penyelesaian perselisihan secara damai atas masalah LCS, meskipun faktanya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Salah satu prinsip utama dari tradisi ASEAN, yang didirikan dengan TAC pada tahun 1976, adalah penyelesaian konflik secara damai. Prinsip ini sudah sering diterapkan dalam hubungan antar negara anggota.

Dengan memahami akar masalah dan masalah utama, bisa digunakan untuk memahami ketidaksepakatan LCS. Di luar potensi, kedaulatan negara yang menjadi aspek terpenting dari isu LCS. ilustrasi konkret tentang tumpang tindih. Sementara itu, lebih banyak penelitian menegaskan kompleksitas situasi. LCS tidak lebih dari kegagalan Perjanjian San Francisco pada tahun 1951, yang menyebabkan status Kepulauan Spratly diberikan setelah kekalahan Jepang di Dunia. Tidak diragukan lagi bahwa adanya berbagai macam gugatan dapat mempengaruhi pertumbuhan atau perluasan sengketa dalam skala yang lebih besar. Faktanya, telah terjadi sejumlah konflik akibat aktivitas klaim timbal balik di LCS. Perspektif AS dalam situasi ini sangat menarik. Selain menjadi rival tangguh China di Laut China Selatan, Amerika Serikat memiliki berbagai tujuan di kawasan tersebut. Akses pelayaran dan stabilitas politik-keamanan LCS pada dasarnya adalah dua kepentingan utama Amerika Serikat. Kebebasan untuk menggunakan akses pengiriman LCS sangat penting bagi Amerika Serikat. Selain itu, menjaga stabilitas LCS berarti menjaga stabilitas Asia Tenggara. Ini memiliki dampak yang signifikan terhadap Amerika Serikat. Penyebab mendasar perang LCS tampaknya adalah potensi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, serta letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Mengingat aktivitas yang meningkat baik secara ekonomi maupun militer di kawasan, sikap tegas China di Laut China Selatan tentu saja semakin memprihatinkan semua pihak.

### *3.3 Amerika Serikat dan China terhadap isu Laut China Selatan*

Amerika Serikat memainkan peran melalui sejumlah taktik sebagai negara besar dan memiliki power, yang dimana dilihat secara geografis jelas berada di luar kawasan Laut China Selatan (LCS), baik dalam hal perdagangan, geopolitik, maupun masalah keamanan. Sementara itu, keterlibatan Amerika dalam sengketa teritorial LCS menjadi sorotan internasional secara signifikan. Sejak pertengahan 1990, Amerika sudah mengungkapkan kebijakan luar negerinya pada Laut Cina Selatan (LCS) ketika terjadi kerusuhan oleh pendudukan China di Mischief Reef pada akhir 1994. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menanggapi hal ini pada Mei 1995.(Dwiguna & Syaroni, 2019) Sejak menyatakan minatnya pada LCS pada tahun 1995, minat Amerika secara bertahap menjadi lebih jelas, terutama di bawah Presiden Obama dan Trump. Pejabat Amerika Serikat secara rutin dan terbuka mengklaim "atas" LCS, yang secara efektif tiga dimensi, bahwa Amerika memiliki "kepentingan vital" dan "kepentingan nasional". Kedua, mempertahankan kebebasan navigasi, termasuk akses tak terbatas ke Laut China Selatan untuk kapal dan pesawat militer Amerika, adalah demi kepentingan terbaik semua orang. Tujuan kedua adalah mempertahankan superioritas militer yang besar atas Amerika, pencegahan strategis yang kredibel melalui penguasaan lautan, dan proyeksi kekuatan untuk mencegah konflik militer dan tekanan politik. Membangun "wilayah berbasis aturan tatanan" yang didominasi oleh Amerika. Dalam LCS, pemerintah Amerika Serikat menyoroti lima aspek krusial terkait kebijakan Amerika Serikat.

Intervensi Amerika Serikat salah satunya ialah relevansi dengan ketegangan LCS dan dilakukan melalui kerja sama bilateral dan kolaboratif dengan anggota ASEAN dalam berbagai disiplin ilmu. Selain memupuk lebih banyak kerja sama ekonomi, komersial, politik, dan teknologi, Amerika secara aktif menerapkan prakarsa strategis, dengan fokus menawarkan dukungan keamanan. Konflik antara China dan Amerika di LCS telah berkembang selama sepuluh tahun terakhir menjadi situasi "konfrontasi dingin", dengan Amerika memandang China lebih sebagai "negara", "revisionis", dan "lawan strategis". Untuk bersaing melawan China, Amerika terus bekerja dengan sekutunya di seluruh dunia, termasuk Australia, Korea Selatan, dan Jepang, selain memperkuat aktivitas militernya sendiri di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan tingginya frekuensi ketegangan antara kedua pihak. Hubungan bilateral kedua belah pihak negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah berdampak pada kondisi dan situasi keamanan kawasan karena kondisi divergensi aspirasi serta kepentingan kedua belah pihak juga semakin intensif (Chan & Li, 2015). Meskipun memiliki kepentingan untuk melestarikan wilayah Laut China Selatan sebagai milik global bersama dan terbuka dengan membiarkan aliran ekonomi dan militer tanpa hambatan, Amerika belum menetapkan klaim atau hak maritim apa pun di wilayah tersebut. Amerika telah didorong untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Pasifik Barat dan memastikan bahwa China tidak mendapatkan keuntungan di kawasan tersebut, khususnya karena persaingan dengan China.

### *3.4 Sikap Indonesia terhadap krisis pada Laut China Selatan*

Sikap Indonesia pada isu Laut China Selatan (LCS) tentunya didasarkan pada kepentingan nasional serta menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dan berusaha untuk tidak memihak dan terlibat dalam menjaga perdamaian internasional semaksimal mungkin. Stabilitas kawasan Laut China Selatan juga akan memberikan kontribusi bagi keamanan dan stabilitas Negara Indonesia, yang akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi negara (Pedrason, 2020). Selain pada perdagangan yang cukup besar antara Indonesia dan China, Laut China Selatan berpotensi menguntungkan perekonomian Indonesia secara global. Sebut saja pelayaran, barang tambang, perikanan, minyak, gas, dan berbagai hal lainnya. Indonesia berpartisipasi dalam penyelesaian konflik tidak hanya sebagai bangsa tetapi juga sebagai anggota ASEAN. Indonesia mampu bergerak lebih bebas serta mendapat dukungannya dari anggota lain karena merupakan

salah satu anggota ASEAN yang lebih besar, salah satu pendirinya, dan pemimpin alami. Diposisikan secara strategis di ASEAN, Indonesia dapat memanfaatkan ASEAN untuk membantu menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.

Sebagian Laut China Selatan (LCS) diklaim oleh Indonesia, khususnya Laut Natuna. Yang mana Indonesia telah lama mengklaim Natuna sebagai komponen penting wilayahnya, menurut konsep UNCLOS. Yang mana UNCLOS secara khusus memberikan perlakuan istimewa kepada negara kepulauan di dunia ini. Indonesia telah menetapkan bahwa situasi Natuna sudah berakhir atas dasar konsensus umum di seluruh dunia. Meskipun pengembangan ekstensif, tampaknya China memiliki versi LCS-nya sendiri. Pulau-pulau yang berada dalam ‘nine dash line’ pada peta yang dibuat Tiongkok dengan konsep garis sembilan putus adalah wilayah Tiongkok. dan setiap nama pulau memiliki terjemahan bahasa Tionghoa yang berbeda. Penegasan sepihak China tersebut memicu tanggapan keras dari Indonesia. Indonesia memprotes peta yang dirilis China. Akibat ulah nelayan dan aparat keamanan China di perairan Natuna, pemerintah Indonesia menyikapinya dengan lebih tegas. Indonesia menggarisbawahi keprihatinannya atas tindakan yang diambil China. Indonesia memanggil duta besar China untuk Indonesia sebagai bentuk ketidakpuasan dan menuntut penjelasan atas aktivitas penjaga laut dan nelayan China. Keputusan Pemanggilan duta besar China oleh Indonesia memberikan persepsi dan menunjukkan bahwa Indonesia memandang perilaku China sebagai pelanggaran hubungan internasional. Selain itu, sebagai langkah preventif, pemerintah Indonesia meningkatkan pengamanan di perairan laut Natuna. Tindakan di masa depan dari China bisa serupa. Bahkan Pada Januari 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pulau Natuna dengan armada perang Indonesia. Presiden Joko Widodo yang berkunjung dan melakukan aksi serupa pada 2016, menggelar konferensi di kapal perusak KRI Imam Bonjol 383 tak lama setelah TNI AL menyergap kapal China tersebut. Kehadiran presiden dan pengerahan personel bersenjata secara luas merupakan strategi lain yang dilakukan Indonesia untuk meyakinkan pemerintah China bahwa Natuna adalah wilayah Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Krisis di Laut Cina Selatan mengakibatkan Rivalitas dari Amerika dan China, walupun Amerika bukanlah Negara yang memperebutkan wilayah dikawasan tersebut tetapi Amerika mencampuri permasalahan yang berada di wilayah tersebut, akibatnya terciptalah saling ancam antara Amerika dan China yang mana mempengaruhi situasi politik dan keamanan bagi Indonesia dan Negara Negara kawasan, pada perkembanganya LCS berada pada situasi yang krisis, Indonesia mempunyai sikap dan respon tersendiri dengan krisis yang berlangsung di LCS, Sebagai Negara pencetus Gerakan Non-Blok (GNB) Indonesia berusaha untuk tidak memihak dan terlibat dalam menjaga perdamaian internasional semaksimal mungkin.

#### 5. Referensi

- Asean, P., Sengketa, P., Budi, S., & Bangun, H. (2021). *Jurnal komunikasi hukum*. 7.
- Bakamla Usir Kapal Cost Guard Cina dari ZEE Natuna Utara - *Bisnis Tempo.co*. (n.d.). Retrieved March 18, 2023, from <https://bisnis.tempo.co/read/1385687/bakamla-usir-kapal-cost-guard-cina-dari-zee-natuna-utara>
- Chan, I., & Li, M. (2015). New Chinese Leadership, New Policy in the South China Sea Dispute? *Journal of Chinese Political Science*, 20(1), 35–50. <https://doi.org/10.1007/s11366-014-9326-y>
- Dwiguna, A. R., & Syaroni, M. (2019). Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok di Laut China Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 2(2), 145–156. <http://jurnalpkn.ui.ac.id/index.php/jkskn/article/view/27>
- Maksum, A. (2017). *Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan*. 3(1), 1–25.
- Pedrason, R. (2020). Analisis Kebijakan Keamanan Indonesia di Tengah Persaingan China dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 997–1008. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/14407>
- Rolf, S., & Agnew, J. (2016). Sovereignty regimes in the South China Sea: assessing contemporary Sino-US relations. *Eurasian Geography and Economics*, 57(2), 249–273. <https://doi.org/10.1080/15387216.2016.1234403>
- Saragih, H. M., & Nasional, U. (2018). *JIPSi*. VIII(1).
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Indonesia’s Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi’s Administration [Respons Indonesia di tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan di bawah Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85–103. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>
- Yee, A. (2011). Maritime Territorial Disputes in East Asia: A Comparative Analysis of the South China Sea and the East China Sea. *Journal of Current Chinese Affairs*, 40(2), 165–193. <https://doi.org/10.1177/186810261104000207>